

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntansi sektor publik merupakan sebuah proses untuk mengumpulkan, mencatat, mengklasifikasikan, menganalisis serta membuat laporan transaksi keuangan untuk sebuah organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi pihak yang membutuhkannya untuk digunakan saat pengambilan keputusan (Nordiawan, 2006). Akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik, baik akuntansi sektor pemerintahan maupun lembaga publik non-pemerintah. Lembaga publik mendapat tuntunan dari masyarakat untuk dikelola secara transparan dan akuntabel.

Menurut Hehanussa (2015) transparansi dan akuntabilitas keuangan publik di Indonesia merupakan isu yang semakin mendapat perhatian dalam beberapa tahun terakhir ini. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari otonomi daerah, sehingga menyebabkan perubahan signifikan dalam komposisi pengeluaran anggaran pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Akibatnya, pemerintah harus dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (pusat dan daerah).

Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan daerah dimana

pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik dalam rangka melaksanakan amanat rakyat. Penelitian yang menguji pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap penggunaan informasi keuangan daerah, memperoleh bukti empiris bahwa penyajian laporan keuangan yang lengkap dan secara langsung tersedia serta aksesibilitas bagi pengguna informasi menentukan sejauh mana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tersebut (Mulyana, 2006).

Transparansi dan akuntabilitas sistem keuangan serta penegakan tata tertib hukum adalah merupakan kunci pokok berhasil tidaknya Indonesia melakukan reformasi. Sistem sosialnya yang mulai berlangsung sejak berakhirnya pemerintahan orde baru pada tahun 1998. Reformasi sosial itu telah merubah system politik yang demokratis. Demokrasi ini tidak hanya menuntut penyelenggaraan Pemilu secara reguler, jujur, adil serta bebas dan rahasia. Demokrasi sekarang ini, rakyat juga menuntut transparansi dan akuntabilitas penggunaan uang pajak maupun hibah serta pinjaman yang menjadi tanggungannya dikemudian hari. Tujuan pokok dari otonomi daerah yang telah dilakukan dalam era reformasi adalah untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat: pendidikan, kesehatan serta infrastruktur ekonomi sosial guna meningkatkan kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan rakyat (Arisma,2010).

Selain melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, juga diperlukan reformasi dalam aksesibilitas laporan keuangan. Aksesibilitas (*accessibility*) laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. Akuntabilitas yang efektif juga tergantung kepada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami (Mulyana, 2006). Sehingga pemerintah selain menyajikan laporan keuangan juga harus memberikan kemudahan dalam mengakses laporan keuangan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan cara memberikan fasilitas kepada berbagai pihak yang mempunyai kepentingan agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah.

Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Pertanggungjawaban itu tidak hanya wajib disampaikan kepada lembaga legislatif, tetapi juga kepada masyarakat sebagai pemberi mandat atau kekuasaan kepada pemerintah. Tujuan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2005) menyebutkan bahwa tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan

keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumberdaya yang dipercayakan kepadanya.

Penyajian laporan keuangan pemerintah daerah juga harus memenuhi unsur-unsur karakteristik kualitatif laporan keuangan sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010 yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat di pahami. Penyusunan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (*openness*) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Apabila informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi kriteria karakteristik laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam PP No. 24 tahun 2005, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami.

Penelitian tentang penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah telah banyak dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Sande (2013) tentang pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (studi empiris pada pemerintah provinsi Sumatera Barat). Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah dan Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penyajian laporan keuangan daerah dan semakin mudah akses terhadap laporan keuangan daerah maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan semakin baik.

Hasil tersebut serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Anies (2012) tentang pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan kabupaten pemalang yang menunjukkan penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian lain juga dilakukan oleh Riana (2014) tentang Pengaruh Pengendalian Internal, *Value For Money*, Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (Studi Empiris pada SKPD Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung). Penelitian tersebut menunjukkan kesimpulan yang sama, yaitu Pengaruh Pengendalian Internal, *Value For Money*, penyajian laporan keuangan dan Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Kabupaten Ponorogo sendiri telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) lima kali berturut-turut sejak tahun 2012 hingga 2017 dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terhadap laporan keuangan daerah kabupaten Ponorogo. www.beritajatim.com. Hal tersebut dilakukan oleh BPK-RI yang melihat berdasarkan transaksi laporan keuangan, sehingga

dengan opini WTP tersebut BPK-RI perlu lebih jauh meneliti tingkat transparansi dan akuntabilitasnya. Berkaitan dengan transparansi, pengguna laporan keuangan daerah masih belum mudah mendapatkan akses laporan keuangan daerah melalui web resmi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKAD) kabupaten Ponorogo melalui alamat dppkad.ponorogo.go.id, dalam pilihan transparansi pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2015 hingga 2017 belum bisa diakses dan tertulis *“Oops, you have encountered an error it appears the page you were looking for doesn’t exist. Sorry about that.”* (Ups, anda mengalami kesalahan tampaknya laman yang anda cari tidak ada. Maaf soal itu).” Namun pada tahun 2014 laporan keuangan dapat diakses. Hal ini berkaitan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang jelas disebutkan salah satunya yaitu pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan yang relevan secara jujur dan terbuka kepada publik melalui media massa maupun via internet sehingga masyarakat dapat mengetahui atau mengaksesnya dengan mudah mengenai informasinya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan fenomena yang terjadi, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai sejauh mana penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah mampu mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada dinas dan badan di kabupaten Ponorogo, karena dinas dan badan juga merupakan instansi pemerintahan

yang mengelola laporan keuangan dan juga menggunakan laporan keuangan. Penelitian sebelumnya menggunakan adanya kondisi daerah yang mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari hasil Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), sedangkan dalam penelitian ini menggunakan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari hasil Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), namun berdasarkan fenomena yang terjadi hal itu masih perlu di analisis dari aspek transparansi dan akuntabilitasnya, sehingga perlu diteliti di penelitian ini, maka peneliti mengambil judul **“Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas dan Badan di Kabupaten Ponorogo”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan diatas maka, rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaruh penyajian laporan keuangan daerah terhadap Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada dinas dan badan di kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimanakah pengaruh aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada dinas dan badan di kabupaten Ponorogo?
3. Bagaimanakah pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara bersama-sama terhadap

transparasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada dinas dan badan di kabupaten Ponorogo?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada dinas dan badan di kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui pengaruh aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada dinas dan badan di kabupaten Ponorogo.
3. Untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan secara bersama-sama terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada dinas dan badan di kabupaten Ponorogo.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain :

1. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi sebagai perbandingan bagi peneliti lain dengan materi yang

berhubungan dengan akuntansi sektor publik serta sebagai tambahan perpustakaan yang sudah ada.

2. Bagi pemerintah kabupaten Ponorogo

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam hal penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan dalam rangka peningkatan Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti tentang penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan daerah kabupaten Ponorogo dan untuk mengaplikasikan teori-teori yang dipelajari selama kuliah dalam permasalahan yang nyata di masyarakat.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam penelitian selanjutnya dan sumbangan karya yang dapat menambah perbendaharaan pustaka bidang akuntansi publi



